

TAJUK RENCANA

Transparansi Proses Hukum HRS

INDONESIA sebagai negara hukum masih harus menjalani ujian panjang melalui berbagai peristiwa yang belakangan ini marak dan ramai diperbincangkan orang. Salah satunya adalah proses hukum terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, yakni menyangkut pelanggaran kekarantinaan kesehatan pada akad nikah putrinya di Petamburan Jakarta Pusat. Perkembangan terkini, HRS mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dan siap ditahan. Pada akhirnya polisi pun menahan HRS.

Dalam konteks inilah kita layak mengapresiasi ketaatan hukum HRS. Itulah sebenarnya yang dikehendaki negara hukum. Bahwa seseorang, siapapun dia, tidak boleh diperlakukan semena-mena, apalagi dihukum tanpa melalui proses hukum. Selanjutnya, dalam proses hukum nanti harus dipaparkan secara transparan kepada publik tentang bukan terkait hal-hal teknis penyidikan menjadi kewenangan kepolisian melainkan lebih pada bagaimana hukum itu ditegakkan, bagaimana aparat berperilaku terhadap tersangka, apakah selama menjalani proses hukum itu tersangka telah diperlakukan secara benar dan manusiawi. Tentu publik berhak tahu dan boleh mengontrol kinerja aparat.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni, Komisi III akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 agar diproses secara terbuka (KR 13/12). Penanganan kasus secara terbuka ini sekaligus juga sebagai wujud pertanggungjawaban aparat kepolisian kepada publik.

Dalam kaitan itu, kita juga mendorong aparat kepolisian memproses kasus pelanggaran protokol kesehatan lainnya yang tersebar di Tanah Air.

Kita ingin menghilangkan kesan pene-gakan hukum yang diskriminatif atau tebang pilih. Atau, anggaplah proses hukum terhadap HRS menjadi pijakan untuk mengusut kasus serupa lain-nya.

Bila kita cermati, tim penasihat hukum HRS juga mengingatkan agar kasus HRS tidak mengalihkan perha-tian insiden penembakan 6 anggota FPI oleh aparat kepolisian pada Senin (7/12) dini hari lalu. Lagi-lagi, inilah konsekuensi Indonesia sebagai ne-gara hukum, siapapun berhak untuk hidup, dan hak untuk hidup ini tak bisa dikurangi sedikitpun sebagai amanat konstitusi. Implementasinya, penembakan mati terhadap 6 an-ggota FPI oleh aparat kepolisian tetap harus dipertanggungjawabkan.

Harus ada proses hukum terhadap kasus tersebut. Pertanyaan penting-nya, mengapa 6 anggota FPI itu harus ditembak mati, benarkah ada kondisi darurat yang mengancam jiwa aparat ? Bukankah mereka yang ditembak adalah warga biasa dan bukan teroris ? Kalaupun mengancam, bukankah lebih baik mereka dilumpuhkan agar bisa dibawa ke pengadilan untuk di-adili ? Inilah sederet pertanyaan yang belum menemukan jawab.

Wajar bila kemudian PP Muham-madiyah mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan secara men-yeluruh terhadap insiden penem-bakan 6 anggota FPI. Ini sama sekali tak ada kaitan soal membela FPI atau tidak, melainkan menghormati nyawa atau hak hidup seseorang. Hemat ki-ta, harus dibentuk tim independen un-tuk mengusut insiden penembakan tersebut. Kita harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara kita memang negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Pun kita menghen-daki proses hukum yang adil dan se-mestinya (*due process of law*). □

Menata Kesejahteraan dan Manajemen Guru

Ki Sugeng Subagya

Ins seleksi Calon Pegamai Negeri Sipil (CPNS) ditarik dari sekolah asalnya mengajar dan ditugaskan pada sekolah negeri. Sekolah swasta ‘gigit jari’ dan kekurangan guru.

Konsep dasar otonomi daerah yang merupakan *grand design* pembagian kekuasaan pengelolaan kewenangan pusat dan daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota terimplementasi



KR-JOKO SANTOSO

tidak konsisten. Urusan pendidikan se-jatinya termasuk urusan yang diotonomikan kepada pemerintah daerah. Namun ketika harus berhadapan dengan persoalan guru madrasah, dimana ma-drasah berada dalam naungan Kemen-terian Agama yang kewenangannya tidak diotonomikan, dilema pun terjadi.

Persoalan pengelolaan guru madrasah versus otonomi pendidikan belum mem-peroleh jalan ke luar, terbit Undang-un-dang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satu di antaranya mengatur sebagian kewenang-an pengelolaan pendidikan ditarik dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerin-

tah provinsi. Dalam hal pengelolaan pen-didikan, pemerintah provinsi berwenang mengelola Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) ter-masuk di dalamnya pengelolaan guru dan tenaga kependidikannya.

Komprehensif

Upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer tidak terlepas dari manaje-men guru pada umumnya. Ketika manaje-men guru secara nasional belum tertata dengan baik, tampaknya kebijakan ten-tang guru termasuk guru honorer akan selalu parsial dan insidental. Misalnya bantuan subsidi upah (BSU) dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Alangkah baiknya pemerintah ber-kenan mengkaji manajemen guru se-cara komprehensif dan berkelanjutan. Bukan semata-mata demi kesejahteraan guru honorer, tetapi menyangkut masa depan guru dan masa depan pen-didikan secara nasional. Jika perlu ka-jian dimulai dari sinkronisasi berbagai undang-undang yang mengatur pen-didikan ditautkan kembali dengan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1945.

Perhatian pemerintah terhadap kese-jahetaraan guru honorer melalui real-isasi BSU sebesar Rp 600.000 setiap bu-lan dalam jangka waktu tiga bulan patut disyukuri. Tetapi BSU tidak menjamin masa depan guru honorer. Para guru ho-norer mendambakan kesejahteraan masa depan yang lebih baik dan lebih pasti. □

*) *Ki Sugeng Subagya, praktisi pen-didikan dan kebudayaan.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih parti-sipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fo-tocopy identitas. Terimakasih.

Budaya Bahari dan Penguatan Ekonomi

Boy R Sidharta

zaman. Literasi bahari akan menjadi bekal bagi generasi muda dalam memper-tahankan kesatuan dan kedaulatan kawasan NKRI serta mengembangkan sumberdaya laut untuk menunjang kese-jahteraan bangsa.

Kemenkomarves menyebutkan potensi sumberdaya bahari NKRI berkisar Rp 3.000 triliun per tahun. Namun, belum banyak pihak yang tertarik mewujudkan potensi tersebut menjadi barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan bagi bangsa ini. Di banyak negara, sumber-daya bahari telah dimanfaatkan, bukan hanya untuk mendongkrak perekonomi-an, tetapi juga untuk mendukung pem-bangunan negara-negara tersebut.

Ekonomi bahari, menurut laporan Konferensi Badan Dunia tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNC-TAD) September 2020, merupakan kegiatan yang paling banyak merugi saat pandemi covid-19. Berbagai cara inovatif untuk mengatasi permasalahan yang juga melanda pelaku ekonomi bahari di Indonesia, antara lain membentuk UMKM berbasis digital, *corporate social responsibility* (CSR), bauran pembiayaan (*blended fi-nancing*), hibah filantropi (*philanthropic funds*), dst.

Pada era digital ini, ino-vasi dan kreativitas pelaku ekonomi bahari justru mendapatkan tantangan. Penyedia jasa transportasi (khususnya kargo atau pen-giriman barang) dan bahan makanan dari laut, misal-nya masih dapat men-jalankan bisnis, meskipun dengan skala yang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Kebutuhan dasar hidup manusia harus terpenuhi,

sehingga pengiriman barang dan makan-an akan tetap berjalan. Tentunya makin ‘dipermudah’ dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial.

Wasana Kata

Hingar-bingar peringatan Harnus ta-hun 2020 memang sebaiknya dialihkan menjadi kegiatan nyata yakni memperku-at daya lentur (*resiliency*) dan daya pulih (*recovery*) pelaku ekonomi bahari, khusus-nya UMKM. Penggerak UMKM, yang umumnya para perempuan, merupakan kelompok paling rentan dalam tatanan sosial-ekonomi. Pemulihan ekonomi ba-hari sebagai arus utama pembangunan Indonesia perlu didukung dan didorong pelaksanaannya.

Semangat Harnus dalam mem-perkokoh kesatuan dan keutuhan NKRI dapat diwujudkan dalam penguasaan literasi bahari di kalangan generasi mu-da. Literasi bahari di era digital akan memperbesar peluang terwujudnya penguatan ekonomi dan peningkatan ke-sejahteraan bangsa Indonesia pasca-Covid-19. □

*) *Boy Rahardja Sidharta , Pendidik di Fakultas Teknobiologi UAJY, Korbid Diklat Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) Komda Yogyakarta.*

Pojok KR

Masyarakat jangan lengah hadapai Covid-19.
-- Negara juga tak boleh lengah.

Libur akhir tahun, ASN dan guru di rumah sa-ja.
-- Lebih aman, gaji pun tetap.

Mayoritas tempat usaha belum disiplin prokes.
-- Tugas aparat tegakkan hukum tanpa tebang pilih.

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Per cetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab per cetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenah. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustuti, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkrk23@yahoo.com, ik-lankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaraga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%